



Defisit 31 Miliar Bikin Pemkab dan Dewan Pengeng Cari Solusi

TABANAN, TRIBUN BALI

- Suasana rapat kerja antara badan anggaran (Banggar) DPRD Tabanan dengan TAPD Pemkab Tabanan berlangsung alot di Ruang Rapat Kantor DPRD Tabanan, Senin (6/8). Pasalnya, APBD Tabanan hingga semester I ini mengalami defisit sebesar Rp 41 Miliar lantaran turunya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut membuat kalangan legislatif dan eksekutif yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pusing untuk menutupi defisit tersebut. Adanya anggaran BKK Provinsi sebesar Rp 10 miliar mampu menutupi sebagian dan nilai defisit saat ini masih Rp 31 miliar.

Pada rapat tersebut, Ketua Banggar, I Ketut Suryadi langsung menanyakan tak tercapainya target pendapatan daerah termasuk terjadinya defisit yang mencapai Rp 41 miliar. "Kami mohon penjelasan dari TAPD," tanya dia.

Sekda Tabanan, I Nyoman Wirna Ariwangsa menjelaskan, defisit yang terjadi hingga Rp 41 miliar itu diakibatkan oleh potensi PAD seperti PHR, BPHTB, termasuk pemasukan dari DTW yang ada di Tabanan yang tak mencapai target atau menurun. "Memang terjadi penurunan target pendapatan seperti dari PHR karena berhentinya operasi anpan pacific serta sektor lainnya juga," katanya.

Kepala Bapelitbang IB Wirtamaja melanjutkan, awalnya untuk menutupi defisit terse-

but pihaknya pun mengandalkan bantuan provinsi sebesar Rp 10 miliar dan dana senilai Rp 13 miliar dari BRSU Tabanan, sehingga masih sekitar Rp 18 miliar.

Namun, di tengah perjalanan, dana yang diandalkan dari RSUD Tabanan tidak bisa digunakan karena merupakan dana untuk pembelian obat. Sehingga saat ini hanya bisa menutupi dengan anggaran provinsi sebesar Rp 10 miliar. "Sementara dari pusat sudah tidak ada lagi kucuran dana, jadi sekarang ada defisit sekitar Rp 31 miliar," sebutnya.

Boping Suryadi mendesak eksekutif untuk mencari jalan keluar untuk menutupi defisit tersebut. Menurutnya, masih banyak potensi daerah yang bisa dioptimalkan seperti dari objek wisata. Termasuk ada rencana penerapan e-billing untuk tiket masuk. Akibat terjadinya defisit, TAPD maupun OPD harus kerjas keras untuk merealisasikan target tersebut.

Menerima desakan dan saran dari tim Banggar, Kepala Bakeuda Tabanan, I Dewa Sri Budiarti pun menjawab dengan nada terpaksa dan menyatakan siap untuk meningkatkan target pendapatan seperti potensi dari DTW yang ada. Semula, DTW ditarget memperoleh pendapatan sebanyak Rp 6,5 miliar dan ditingkatkan menjadi sekitar Rp 10 miliar. Ia menilai, dengan peningkatan target tersebut, akan mampu menjawab upaya untuk menutupi defisit. (mpa)



Perbaikan AC Telan Rp 649 Juta

■ Plafon Gedung B dan C RS Mangusada Bolong-bolong

MANGUPURA, TRIBUN BALI - Pihak RS Mangusada di Kelurahan Kapal, Mengwi, Badung memperbaiki beberapa fasilitas yang rusak seperti air conditioner (AC). Perbaikan AC itu untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pasien maupun pengunjung.

Kerusakan AC ini mengakibatkan beberapa plafon gedung bocor dan bolong sehingga mengakibatkan lantai basah. Untuk menanggulangi ketidaknyamanan ini, pihak RS Mangusada menganggarkan Rp 649 juta untuk biaya perbaikannya.

Dirut RSUD Mangusada Badung, dr Nyoman-Gunarta mengatakan, pihak manajemen rumah sakit tengah memperbaiki beberapa AC. Bahkan pihaknya mengatakan, perbaikan AC ini tidak hanya pada AC yang terlihat rusak atau yang mengakibatkan plafon bolong. Namun kini untuk meningkatkan pelayanan, perbaikan AC dilakukan pada Gedung B dan C.

"Ya adanya plafon yang bolong akan diperbaiki nanti. Kini kami akan perbaiki semua AC dulu yang ada di ge-

duing B dan C," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (4/8).

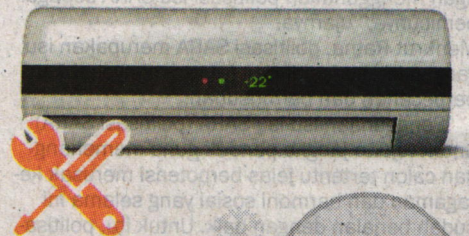
Lebih lanjut ia mengatakan, perbaikan AC tersebut sudah tahap pengerjaan. Bahkan dalam anggaran kontrak pihak rumah sakit telah mengeluarkan dana Rp 649.000.000 yang diambil dari dana pemeliharaan perlengkapan kantor yang bersumber dari BLUD RS.

"Sementara kan semua AC ini (Gedung B dan C) kita perbaiki. Setelah selesai perbaikannya, baru kita perba-

RINCIAN PEKERJAAN

RS Mangusada menganggarkan biaya perbaikan AC sebesar Rp 649.000.000

Anggaran itu untuk perbaikan compressor, penambahan freon, pergantian transistor PCB, main CB, strainer, fuse/reaktor dan perbaikan seluruh kabel data sistem.



Setelah perbaikan AC selesai, akan diperbaiki plafon-plafon yang rusak yang diakibatkan AC rusak.

Perbaikan ditargetkan selesai akhir Agustus.

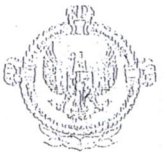


iki plafon-plafon yang rusak akibat terkena tetesan air AC. Selebihnya, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," jelasnya.

Dia mengatakan, perbaikan AC di RS Mangusada masih berlangsung hingga saat ini. Ia mengatakan, perbaikan AC ini ditargetkan selesai akhir Agustus. "Perbaikan ini ditargetkan selesai Agustus 2018. Setelah itu lanjut kami perbaiki plafon. Jadi akhir Agustus sudah selesai perbaikan AC dan plafon," ujarnya.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RS Mangusada, Ketut Kamanjaya mengatakan, anggaran kontrak senilai Rp 649.000.000 tersebut meliputi perbaikan compressor, penambahan freon, pergantian transistor PCB, main CB, strainer, fuse/reaktor dan perbaikan seluruh kabel data sistem.

"Semua bagian AC akan kami perbaiki. Supaya fasilitas yang diberikan tidak mengganggu kenyamanan pasien," ujarnya. (gus)



Transfer Dana Desa Tahap III Dipastikan Molor

BANGLI, TRIBUN BALI

- Transfer Dana Desa (DD) tahap III dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dipastikan molor. Ini disebabkan laporan realisasi serapan kegiatan di masing-masing desa belum seluruhnya mencapai 75 persen meski telah melebihi batas ketentuan.

Sekretaris Badan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, Anak Agung Trisna Wijaya menjelaskan penyaluran DD di tahun 2018 berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu transfer DD dibagi dua tahap yakni 60 persen dan 40 persen. Sementara di tahun 2018, penyaluran dibagi tiga tahap.

"Total Pagu DD tahun 2018 sebesar Rp 52 miliar. Jumlah

ini dibagi dalam tiga tahap, pertama Rp 10,571 miliar, tahap kedua Rp 21,143 miliar, dan tahap ketiga Rp 21,130 miliar," jelasnya.

Realisasi peyaluran DD pada tahap pertama dan kedua diakui sudah 100 persen, hanya saja laporan realisasi serapan dari 68 desa belum mencapai target minimal yakni 75 persen. "Harusnya masing-masing desa sudah melaporkan realisasi serapan 75 persen, tapi hingga batas akhir per tanggal 7 Juni, realisasinya justru masih 69 persen," bebernya.

Mantan Kabag Umum Setda Bangli mengungkapkan, realisasi penyerapan dana desa tak kunjung mencapai batas minimal 75 persen. Hal ini berpengaruh terhadap sejumlah kegiatan di desa lain yang dibiayai menggunakan

DD. Sebab, pengamprahan masing-masing tahapan dana desa wajib menuntaskan laporan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017.

Jika terus terlambat, imbuhnya, akan berbuntut juga pada pencairan DD di tahun berikutnya. "Dampak lain jika laporan serapan terus molor juga berpengaruh pada potongan Dana Alokasi Umum (DAU) ke depannya sebagai sanksi," tegas Trisna.

Terhadap kondisi tersebut, pihaknya berharap hingga pekan kedua bulan ini, kekurangan laporan realisasi serapan sebesar 6 persen bisa segera dilaporkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), serta melampirkan tembusan laporan tersebut ke BKPAD untuk segera diteruskan ke pusat. (mer)



Kerugian Proyek Biogas Rp 729 Juta

■ Kejari Klungkung Terima Hasil Audit dari BPK

■ Kasus Dugaan Korupsi di Nusa Penida

SEMARAPURA, TRIBUN

BALI - Kasus dugaan korupsi proyek biogas di Nusa Penida tahun 2014 memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Klungkung telah menerima laporan hasil kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Klungkung, I Kadek Wira Atmaja menjelaskan, laporan hasil kerugian negara terkait kasus tersebut turun pada 20 Juli 2018 lalu. Dari hasil audit BPK, kerugian mencapai Rp 729.912.654. "Dalam waktu dekat ini, kami akan ekpos perkara bersama tim," ujar Wira, Jumat (3/8).

Namun jika saat ekpos perkara nanti dipandang ada hal yang masih kurang, Kejari Klungkung akan kembali memanggil pihak-pihak terkait sebelum nantinya dilakukan penetapan tersangka. "Jika masih ada hal yang dianggap kurang, tidak menutup kemungkinan kami akan kembali memanggil pihak-pihak yang terlibat terkait kasus ini," kata dia.

Kasus ini berawal dari temuan tahunan BPK. Temuan tersebut menyatakan ada proyek tidak memanfaatkan

di Kecamatan Nusa Pendia. Setelah didalami, proyek tersebut merupakan pemasangan biogas senilai Rp 890 juta yang bersumber dari DAK Kementerian ESDM dan dana pendamping dari Pemkab Klungkung 10 persennya.

Leading sektor proyek ini ada pada Badan Pemerintahan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan KB. Proyek pemasangan biogas ini dikerjakan tahun 2014 dengan sasaran tiga desa yakni Desa Kutampi Kaler, Desa Kelumpu, dan Desa Sakti.

Pemasangan ditarget 40 unit, tersebar di tiga desa tersebut. Namun yang terpasang 38 unit dan parahnya proyek biogas ini setelah dicek ternyata sama sekali tidak termanfaatkan. Padahal per satu unitnya, proyek tersebut bernilai Rp 22 juta.

Pihak kejaksaan melihat ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam proyek biogas ini. Dengan demikian proyek ini pun tidak bisa termanfaatkan. (mit)

Penetapan Tersangka Tunggu Ekpos Perkara

PROSES penyelidikan dan Berita acara Pemeriksaan (BAP) kasus dugaan korupsi proyek biogas di Nusa Penida tahun 2014, sebenarnya sudah rampung saat Kasi Pidsus Kejari Klungkung dipimpin oleh Meyer Simanjuntak.

Pihak kejari sebelumnya hanya menunggu hasil audit BPK untuk tetapkan tersangka. Kejari pun sudah mengantongi nama tersangka dan tinggal mengumumkannya saja. Kasus ini juga menyeret nama lebih dari satu tersangka.

Selain penerima bantuan biogas, Kejari juga memeriksa pejabat Eselon II (setingkat kepala dinas), Eselon III (setingkat kepala bidang), dan termasuk anggota DPRD aktif beserta istrinya karena terlibat sebagai pemborong. "Penetapan tersangka nanti menunggu hasil ekpos perkara itu," ujar Kasi Pidsus Kejari Klungkung, I Kadek Wira Atmaja. (mit)